

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat merupakan hubungan yang spesial. Arab Saudi adalah salah satu kawan dagang terpenting bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat membeli minyak Arab Saudi dan sebagai imbalannya maka Arab Saudi mengeluarkan sekitar 25% dari anggaran untuk mengimpor senjata dari Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat telah berlangsung cukup lama, hal itu dimulai sejak diberikannya hak konsensi penambangan minyak di bagian Timur Arab Saudi kepada konsorium pertambangan minyak Amerika Serikat di tahun 1939. Hubungan kedua negara memang mengalami dinamika pasang surut (*up and down*) dari waktu ke waktu. Gangguan dalam hubungan ini biasanya muncul sebagai implikasi konflik Palestina dan Israel. Puncaknya adalah tatkala Arab Saudi melakukan embargo minyak terhadap persekutuan Barat yang dianggap membela Israel dalam Perang Yom Kippur (1973).<sup>2</sup>

Hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat mulai memburuk sejak tahun 2002 akibat adanya perbedaan yang tajam dan fundamental mengenai Israel, demokrasi, Iran, dan isu-isu lainnya. Dirasa Presiden Bill Clinton gagal membawa Suriah dan Israel ke meja perundingan damai di Shepherdtown. Selain itu juga gagal menengahi proses perdamaian antara Palestina dan Israel di Camp David.

Pada tahun 2009 era Obama pasca memenangi pemilu, Riyadh menjadi tujuan pertama kunjungan Obama ke negara-negara Timur Tengah. Kunjungan Presiden Barack Obama ke Riyadh dapat dilihat sebagai upaya Washington untuk

---

<sup>1</sup> Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000, hlm. 142-143

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 151-152

menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut serta menekankan pada kepentingan bersama. Namun hal ini diyakini tidak akan mampu secara cepat membangun kembali kedekatan hubungan seperti yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.<sup>3</sup>

Penyelesaian masalah Palestina merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Arab Saudi yang dirumuskannya tahun 1943. Tugas dan misi tersebut berisi bahwa penyelesaian masalah Palestina ditempuh dengan dua cara, yaitu Arab Saudi bersatu dengan negara-negara Arab lainnya untuk menyelesaikan Palestina dan Arab Saudi mempengaruhi Amerika Serikat untuk menjadi mediator yang adil dalam menyelesaikan masalah Palestina. Namun, pelaksanaan untuk menarik Amerika Serikat menjadi mediator yang adil masih mendapat hambatan eksternal dan internal.

Hambatan eksternal dan internal yang dimaksud sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Kuatnya lobi pro-Israel terhadap pengambil kebijakan (*decision maker*) di Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat dapat mengorbankan hubungan khususnya dengan Arab Saudi, terutama menyangkut penyelesaian masalah Palestina.
- b. Lemahnya dukungan negara-negara Arab lainnya atas kepemimpinan Arab Saudi (*Arab Leadership*) membuat Arab Saudi tidak dapat berperan optimal, karena tidak mendapat wewenang penuh dari negara Arab lainnya.
- c. Lemahnya pengaruh Arab Saudi terhadap Amerika Serikat akibat ketergantungannya di bidang politik, militer dan ekonomi, sehingga

---

<sup>3</sup> <https://www.kiblat.net/2016/04/18/hubungan-kuat-saudi-berbeda-tapi-saling-membutuhkan> diakses 7/09/2017 pukul 10:55

<sup>4</sup> <http://ww.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75679> diakses 6/09/2017 pukul 07:20

Arab Saudi tidak mempunyai posisi tawar menawar yang memadai terhadap Amerika Serikat, dan ketergantungan Arab Saudi tersebut menempatkan kedua negara tidak mempunyai hubungan khusus dalam arti yang sesungguhnya.

- d. Perbedaan sosial budaya antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat mengakibatkan kedua negara tidak mendapat dukungan yang penuh dari warga kedua negara masing-masing, dan bahkan perbedaan sosial budaya tersebut dapat menghambat usaha pemerintah kedua negara untuk menyelesaikan masalah Palestina.
- e. Adanya konflik elit di Arab Saudi mengenai hubungan yang ideal antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat, sehingga para elit di lingkungan kerajaan tidak mempunyai pandangan yang sama mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses perdamaian. Dan dari pihak Arab Saudi tidak mempunyai strategi yang baku untuk membawa Amerika Serikat dalam menyelesaikan masalah Palestina.
- f. Lemahnya pengaruh pro-Palestina di Arab Saudi merupakan akibat sistem politik Arab Saudi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga Arab Saudi terlihat pasif dalam mencari terobosan baru dalam penyelesaian masalah Palestina dan cenderung menunggu inisiatif dari Amerika Serikat.

Revolusi Arab Spring membuat hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat semakin memburuk. Raja Abdullah menginginkan Obama mendukung penuh diktator Mesir Husni Mubarak dan tidak meninggalkan sekutu lamanya tersebut. Namun ternyata pasca lengsernya Husni Mubarak, Barat melihat demokrasi di Mesir yang Sunni lebih buruk daripada demokrasi di kalangan Syiah di Iraq. Perubahan rezim otoriter

Husni Mubarak ke arah “demokrasi” Mesir di bawah Presiden Muhammad Mursi merupakan sebuah tantangan bagi esensi dan eksistensi monarkhi di negara-negara kawasan Teluk. Bahkan lebih sulit lagi bagi Arab Saudi untuk menerima gagasan mengenai reformasi politik dan demokrasi di Bahrain, dimana monarkhi Sunni merasa terancam oleh mayoritas Syiah di sebuah negara kaya minyak yang berada di seberang pantai wilayah provinsi bagian timur kerajaan Raja Fadh tersebut.

Dinamika politik di Bahrain menjadikan sumber keuangan Kerajaan Saudi dipertaruhkan. Washington secara terbuka bersimpati dengan reformasi di Bahrain, maka dari itu Riyadh dan Abu Dhabi mengirim pasukan dan kendaraan lapis baja ke Bahrain yang mana hingga saat ini masih berada di sana. Akhirnya upaya kontra revolusi oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah menang, paling tidak untuk saat ini.

Keretakan antara kedua negara pasca revolusi Arab Saudi tahun 2011 nampaknya diperbaiki pada era Raja Salman. Bagaimanapun kedua kekuatan regional ini saling membutuhkan, mengingat pengaruh Iran yang meluas di Irak, Yaman, Lebanon dan Suriah. Masyarakat muslim dunia menaruh harapan pada Raja Salman. Namun kedirian Kerajaan Saudi tidak bisa dilepaskan dari banyak faktor, baik sejarah berdirinya maupun kebijakan politik para pendahulunya yang telah sekian lama menjadi garis kerajaan. Salah satunya adalah faktor Amerika Serikat sebagai mitra strategis Arab Saudi di kawasan Teluk.

Mengharapkan kebijakan Arab Saudi dalam bidang politik Timur Tengah akan berbeda dengan kebijakan Amerika Serikat merupakan bagaikan mimpi di siang hari. Apalagi keduanya mempunyai kepentingan yang sama terkait *Arab Spring*, gerakan Islam dan isu terorisme. Bagaimanapun Arab Saudi akan sangat sulit untuk terpisah dengan Amerika Serikat. Seandainya Arab Saudi memiliki upaya untuk berpisah dengan Amerika Serikat, pasti membutuhkan waktu lama dan bertahap. Kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Raja Salman adalah sekedar mengurangi intensitas hubungan

saja. Atau jika memungkinkan, Arab Saudi akan mencari partner baru, dan Turki adalah sebuah pilihan yang rasional meskipun tidak secara terang-terangan.<sup>5</sup>

Berikutnya adalah Mesir, Riyadh sangat mengetahui siapa Jenderal Abdul Fattah al-Sissi yang telah mengukudeta pemerintahan Mursi yang sah, karena al-Sisi adalah mantan pejabat atase militer Mesir di Arab Saudi. Pengeran Bandar, mantan duta besar Saudi untuk Amerika Serikat yang kemudian pada tahun 2013 menjadi kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Arab Saudi mendukung al-Sissi sebagai “Mubarak” baru. Ketika al-Sissi merebut kekuasaan, tidak lebih dari 5 menit kemudian Raja Abdullah mengakui kudeta militer di Mesir telah sah. Sejak itu Arab Saudi memberikan dukungan dana kepada rezim diktator al-Sissi.

Raja Abdullah dikenal sebagai pemimpin yang cukup hati-hati dan cenderung menghindari resiko. Sementara Raja Salman jauh lebih tegas dan agresif. Pernah suatu hari pada tanggal 27 Januari 2015, dalam kunjungan kenegaraan Obama untuk berta’ziah atas kematian Raja Abdullah, tanpa basa basi Raja Salman meninggalkan Barack Obama dan rombongan di bandara sebelum melewati karpet merah penyambutan. Diketahui alasan Raja Salman meniggalkan Obama adalah untuk sholat Ashar setelah ia mendengarkan kumandang adzan di masjid kawasan bandara. Sebagian pihak menilai insiden ini sebagai bentuk penghinaan terhadap Presiden Barack Obama, meskipun sebagian yang lain memberikan apresiasi dan pujian karena merasa terwakili.

Reputasi lain penguasa baru klan al-Saud ini adalah keberaniannya mengambil keputusan untuk terlibat dalam perang di Yaman dengan memimpin koalisi sembilan negara kawasan Teluk, mengeksekusi puluhan jihadis dengan tuduhan terlibat terorisme, membentuk pakta militer “negara-negara

---

<sup>5</sup> Muhammad Zulifan, “Peneliti Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam-UI: Sejarah Arab Saudi, Raja Salman dan Harapan Perubahan”, diakses dari <https://duniatimeng.com/sejarah-arab-saudi-raja-salman-dan-harapan-perubahan/> pada 21/11/17 pukul 09:00

Islam” untuk melawan Syiah Iran. Raja Salman juga berkunjung ke Kairo dengan menjanjikan bantuan dan investasi bernilai milyaran termasuk pembangunan jembatan yang menghubungkan kedua negara melewati Laut Merah. Lembaga Ulama Arab Saudi menekan Raja Salman untuk bertindak lebih keras terhadap apa yang mereka sebut dengan rezim setan Syiah Iran. Dalam bulan April 2017 ini sebanyak 140 ulama kerajaan yang selama ini dekat dengan Raja Salman mengajukan petisi yang mendorong suatu gerakan atau perjuangan ideologis di dunia Islam untuk menghadapi ekspansi ideologi Syiah Iran.

Perlu diketahui, dalam negara Arab Saudi kedekatan Raja dan Ulama merupakan kedekatan yang berimplikasi pada suatu kebijakan. Suatu kebijakan yang lahir dari raja tidak lepas dari pengaruh para ulama Arab Saudi atau yang disebut *dewan majlis syura*. Ulama dalam tradisi Islam adalah sosok yang sangat penting dalam menjaga berjalannya penerapan syariat Islam di masyarakat atau di negara Islam. Ulama bisa berada di sisi masyarakat dan atau berada disisi penguasa. Peran ulama menjadi berubah saat terjadinya modernisasi politik di negara-negara bekas wilayah kekuasaan Usmani. Banyak ilmuwan yang menganggap bahwa peran ulama tergusur dan akhirnya menjadi subordinat dari penguasa atau bahkan menjadi legitimasi bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam kaitanya dengan negara Arab Saudi peran dewan majlis syura’ sangatlah penting hal itu bisa dilihat dari fakta-fakta diatas.

Di tengah semua perbedaan yang ada, hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat tidak terputus sama sekali bahkan kedua negara masih saling membutuhkan. Raja Salman dan Presiden Barack Obama masih memiliki kepentingan bersama dan kesepakatan-kesepakatan lain yang saling bertemu. Barack Obama telah menjual senjata senilai US\$ 95 milyar ke kerajaan itu. Keduanya juga sama-sama memerangi ISIS dan al-Qaidah. Putra Mahkota Muhammad Bin Nayef selama ini terbukti merupakan partner vital bagi Amerika Serikat dalam kerjasama di bidang keamanan. Kedua negara akan merasa

perlu untuk meningkatkan kerjasama memerangi AQAP (al-Qaeda in the Arabian Peninsula) yang diam-diam mengalami perkembangan secara dramatis sebagai efek tak terduga invasi koalisi Arab Saudi dukungan Amerika Serikat ke Yaman. Obsesi dan ambisi Iran akan sebuah imperium “Persia Baru” telah mendorong negara Syiah itu secara agresif ikut campur tangan di banyak negara Arab.

Di sini pula ada peluang kepentingan bersama antara Washington dan Riyadh untuk bekerjasama membatasi pengaruh Iran terutama di negara-negara kawasan Teluk. Ada resiko yang serius bahwa Iran akan mendukung gerakan-gerakan subversif di berbagai tempat di seluruh dunia mengingat negara itu memiliki lebih banyak pemasukan dari sumber minyak. Agenda selanjutnya adalah Suriah, Arab Saudi menginginkan komitmen yang jelas bagi upaya pelengseran Basyar al-Assad. Mereka meyakini perang sipil yang telah memasuki tahun kelima itu bisa diselesaikan dengan syarat Basyar Assad harus lengser. Meskipun gagal, konferensi Riyadh yang diselenggarakan sebagai kelanjutan dari konferensi Wina mengindikasikan bahwa pada dasarnya terdapat irisan (*intersection*) kepentingan antara rezim Saudi dengan Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan utama dunia lainnya. Membawa “perdamaian” di Yaman sangat berpeluang menjadi prioritas utama. Gencatan senjata dengan Hautsi bisa dilihat sebagai dari propaganda Arab Saudi untuk menunjukkan itikad baik mereka akan “perdamaian”, menyusul kegagalan aksi militer koalisi untuk mengusir pemberontak Hautsi dari ibukota Sanaa.

Hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat menurut opini masyarakat Saudi secara umum adalah positif terhadap gaya kepemimpinan Barack Obama. Dapat dilihat disini Arab Saudi merupakan eksportir terbesar kedua setelah Kanada bagi Amerika Serikat (sebanyak 1.338.000 barel per

hari di bulan Februari 2017).<sup>6</sup> Selain itu Arab Saudi merupakan Negara terbesar importer persenjataan (*defense market*) dari Amerika Serikat pada tahun 2015.<sup>7</sup>

Krisis Qatar pada 5 Juli 2017 lalu membuat Arab Saudi menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Donald Trump melakukan dialog terpisah antar Arab Saudi dan Qatar, sebagai penghubung jalan damai. Peristiwa Qatar ini berawal dari Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab menuduh Qatar mendukung terorisme, sebuah tuduhan yang sejak awal dibantah oleh Doha. Alasan tersebut yang menyebabkan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi menutup perbatasannya dengan Qatar dan keempat negara itu kemudian menutup hubungan udara dan laut dengan Qatar.

Pembicaraan melalui telepon yang dilakukan pada Jumat itu terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara secara terpisah dengan kedua belah pihak. Pembicaraan melalui saluran telepon ini merupakan kontak formal pertama antara Riyadh dan Doha sejak krisis diplomatik pada awal Juni lalu. Media resmi pemerintah dari kedua pihak melaporkan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dan Pangeran Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, telah mendiskusikan perlunya dialog untuk menyelesaikan krisis tersebut. Badan Pers Arab Saudi mengatakan bahwa pemimpin Qatar menyatakan keinginannya untuk duduk di meja dialog dan membahas tuntutan keempat negara.<sup>8</sup>

Dalam kunjungan kenegaraan perdana, Donald Trump memilih Arab Saudi sebagai tujuan pertama. Kunjungan kenegaraan pertama Presiden sering dibaca sebagai tanda prioritas kebijakan pemerintah dan belum ada pemimpin

---

<sup>6</sup> “Company Level Imports”, dalam <https://www.eia.gov/petroleum/imports/companylevel/>, diakses 2/05/18 pukul 12:15

<sup>7</sup> “2016 *Defense Markets Report Regional and Country Case Study*”, hlm. 3

<sup>8</sup> <https://www.krisisarabqatardiakses> 5/10/17 pukul 19:15



Amerika Serikat sebelumnya yang memilih kerajaan tersebut untuk terjun ke dunia internasional awal mereka. Dan kunjungan yang dilakukan oleh Donald Trump mendapat sambutan dari kerajaan jauh lebih hangat dibandingkan kunjungan mantan Presiden Barack Obama tahun lalu.

Hal ini memunculkan spekulasi ketidakpastian mengenai hubungan khusus Arab Saudi dengan Amerika Serikat kedepannya, apakah Amerika Serikat masih memiliki pengaruh seperti yang dimilikinya di era Perang Dingin, ataukah pengaruh tersebut akan hilang dan tergantikan oleh suatu hal yang lain dikarekanakan kebijakan luar negeri Arab Saudi saat ini yang lebih bebas dan terbuka.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diambil berdasarkan uraian diatas adalah: **Mengapa Arab Saudi menjalin hubungan yang sangat kuat dengan Amerika Serikat meskipun banyak isu internasional yang berpotensi mengganggu hubungan mereka?**

## **C. Kerangka Dasar Pemikiran**

Dalam hal ini teori dan konsep akan membantu menjelaskan masalah-masalah diatas. Konsep adalah abstraksi yang merepresentasikan sebuah objek, karakter sebuah objek, atau fenomena tertentu.<sup>9</sup> Salah satu fungsi dari konsep adalah mensistematisasikan ide-ide, persepsi-persepsi, dan simbol-simbol dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi.<sup>10</sup> Sedangkan teori membantu menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena tertentu. Menurut McCain dan Segal, teori adalah sekumpulan pernyataan-pernyataan yang terhubung yang mengandung hal-hal berikut: 1) Kalimat-kalimat yang memperkenalkan pemaknaan serta mengacu pada konsep-konsep dasar teori; 2) Kalimat-kalimat yang menghubungkan

---

<sup>9</sup> Mohtar Mas' oed, *Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 93-94

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 95

konsep-konsep dasar; 3) Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritik dengan sekumpulan kemungkinan objek pengamatan empirik (yaitu hipotesa).

Sebagai pedoman bagi penulis untuk mempermudah melakukan kegiatan penelitian dan analisis data yang ada serta mencegah terjadinya distorsi pembahasan objek penelitian dan meluasnya pembahasan kearah yang tidak signifikan, maka penulis mencoba mengajukan kerangka berpikir berdasarkan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang diungkapkan oleh William D. Coplin sebagai analisis untuk mengkaji hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi beberapa faktor determinan antara lain:<sup>11</sup>

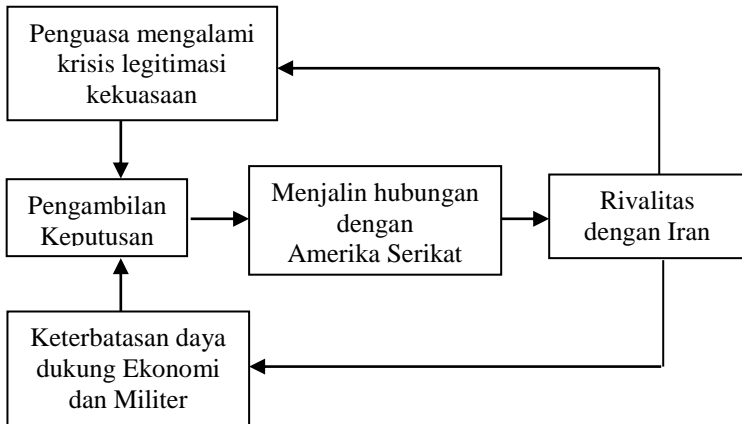
1. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi faktor budaya sebagai dasar tingkah laku politik, keadaan atau situasi di dalam negeri, yaitu situasi Politik di dalam Negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut;
2. Situasi ekonomi dan militer domestik, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan;
3. Konteks internasional, (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relavan dengan permasalahan yang dihadapi.

Untuk lebih jelas, ilustrasi bagan di bawah ini akan menjelaskan interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik luar negeri:

---

<sup>11</sup> Sidik Jatmika, *Op.cit.*, hlm. 150

Bagan 1. Model Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin<sup>12</sup>



Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Untuk itu penulis akan menerapkan ketiga faktor tersebut dalam kedekatan politik luar negeri Arab Saudi dengan Amerika Serikat, sebagai berikut:<sup>13</sup>

Pertama, Penguasa mengalami krisis legitimasi kekuasaan akibat adanya persaingan antar elit Arab Saudi yaitu persaingan antar pangeran untuk mendapatkan gelar Putra Mahkota, keberadaan kelompok Syiah di Arab Saudi dan Rakyat yang tidak puas dengan bentuk pemerintahan yang ada.

Kedua, Arab Saudi menyadari keterbatasan daya dukung ekonomi dan militer terhadap eksistensi monarkhinya. Arab Saudi membutuhkan dukungan ekonomi dalam bentuk pengelolaan Sumber Daya Minyak Bumi dan

---

<sup>12</sup> William D. Coplin dan Mercedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional suatu telaah teoritis*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensido, 2003, hlm. 86

<sup>13</sup> Penerapan dari beberapa sumber yang penulis baca

membutuhkan dukungan dalam bentuk pertahanan keamanan wilayah.<sup>14</sup>

Ketiga, adanya perebutan pengaruh antara Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah yang akhirnya mempengaruhi politik luar negeri Arab Saudi.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan teori pembuatan kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh William D. Coplin, maka dapat diambil hipotesa bahwa kedekatan politik luar negeri Arab Saudi dengan Amerika Serikat meskipun banyak isu internasional yang berpotensi mengganggu hubungan tersebut yaitu disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Kondisi politik dalam negeri Arab Saudi yaitu penguasa mengalami krisis legitimasi kekuasaan, sehingga Arab Saudi membutuhkan bantuan Amerika Serikat agar tidak dijatuhkan.
2. Kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi yang lemah menyebabkan Arab Saudi membutuhkan Amerika untuk mengolah minyak dan Arab Saudi membutuhkan keamanan bagi lingkungan sekitarnya.
3. Konteks internasional yaitu adanya persaingan Arab Saudi dengan Iran.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian, penulis akan membatasi jangka waktu antara tahun 2011-2017. Hal itu didasarkan atas pasca fenomena *Arab Spring* pada tahun 2011 yang berdampak krisis politik para penguasa di Timur Tengah dan pada tahun 2017 merupakan tahun transisi antara pemerintahan Raja Salman dan Pangeran Mahkota

---

<sup>14</sup> Leonard Hutabarat, "Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam Studi Hubungan Internasional" Jurnal Ilmiah Sosial dan Ilmu Politik, Vol. V diakses 23/10/17 pukul 19:00

Muhammed bin Salman. Penulis membatasi hingga masa pemerintahan Raja Salaman.

## **2. Metode Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah, dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana dalam mengumpulkan data digunakan metode literatur yaitu dengan cara menelaah buku-buku, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal, koran, majalah, artikel, internet (*web site*) dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar pemikiran yang telah ditetapkan.

## **3. Alasan Pemilihan Judul**

Arab Saudi adalah tempat lahirnya agama Islam. Selain itu di Arab Saudi terdapat kota suci Mekah dan Madinah, hal ini menjadikan posisinya sangat netral dalam percaturan politik Timur Tengah dan negara-negara Islam. Amerika Serikat merupakan pemain utama yang berpengaruh dalam dinamika percaturan politikdunia, khususnya di Timur Tengah dan memiliki hubungan diplomatik yang bisa dikatakan “khusus” atau “istimewa” dengan Arab Saudi.

Hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi telah dimulai sejak adanya kecocokan antara kedua negara dan itu tidak lepas dari kepentingan nasional pada tahun 1930-an meskipun penduduk Amerika Serikat mayoritas Kristen. Pada tahun 1930-an Raja Abdul Aziz telah menerima seorang jutawan Amerika Serikat agar dapat membantu mengolah kekayaan sumber daya alam bawah tanah Arab Saudi. Kerjasama pertama antara kedua negara yaitu kehadiran perusahaan minyak dari California yang berdiri pada tahun 1938 yaitu Aramco. Kerjasama kedua negara telah banyak mengalami perkembangan.

Ditengah semua perbedaan, hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat tidak terputus sama sekali, kedua negara ini

masih saling membutuhkan hingga saat ini. Dari beberapa alasan diatas, penulis mengambil judul ini.

## **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini disusun bertujuan untuk:

1. Mengetahui teori-teori Hubungan Internasional pada umumnya dan pada khususnya yang berkaitan tentang Faktor Kedekatan Politik Luar Negeri Arab Saudi dengan Amerika Serikat.
2. Menganalisa dan mengkaji variabel yang terkait tentang Faktor Kedekatan Politik Luar Negeri Arab Saudi dengan Amerika Serikat.
3. Mengetahui bagaimana menggunakan perspektif dan konsep tertentu dalam suatu penelitian yang melibatkan operasionalisasi konsep.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** menerangkan mengenai Dinamika Hubungan Politik Luar Negeri Arab Saudi dengan Amerika Serikat.

**Bab III** menerangkan mengenai Krisis Politik Para Penguasa di Timur Tengah dan Proses Perubahan Menuju Demokrasi.

**Bab IV** menerangkan mengenai analisis hipotesa yaitu faktor-faktor yang menjadi alasan kedekatan politik luar negeri Arab Saudi dengan Amerika Serikat dari segi: 1) kondisi politik dalam negeri Arab Saudi; 2) kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi; dan 3) konteks internasional Arab Saudi.

**Bab V** berisi tentang Kesimpulan-kesimpulan secara menyeluruh dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.